

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat adalah sebuah negara ideologis. Negara ini dibangun atas dasar ideologi kapitalisme. Politik luar negeri Amerika Serikat tidak bisa dilepaskan dari basis ideologi kapitalisme ini. Negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat, akan selalu menyebarluaskan ideologinya kapitalisme ke seluruh dunia dengan metode yang tetap, yaitu penjajahan. Penjajahan ini dilakukan dengan berbagai bentuk; meliputi politik, ekonomi, militer, budaya, dan yang lainnya. Ini pula yang menjadi grand strategi politik luar negeri Amerika Serikat yang tidak pernah berubah. Yang mengalami perubahan adalah aplikasi dari grand strategi itu pada level menengah atau bawah.

Dalam format politik internasional Amerika Serikat, dua pilar paling mengemuka yang dijadikan kebijakan pokok negara adidaya itu adalah demokratisasi (termasuk HAM) dan liberalisme ekonomi dunia. Dalam hal ini, perlu diperhatikan pernyataan seorang penasihat mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, untuk keamanan nasional. Dalam pidatonya, tanggal 21 September 1993, ia mengatakan, "Kita harus menyebarkan demokrasi dan ekonomi pasar bebas, karena hal ini akan dapat menjaga

kepentingan-kepentingan kita, memelihara kita, sekaligus menunjukkan nilai-nilai anutan kita, yaitu nilai-nilai Amerika Serikat yang luhur.”

Dalam bidang politik, berbagai aturan yang jelas-jelas bersumber dari ideologi kapitalisme dibuat dan diinternasionalisasikan. Lahirlah, antara lain, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Right*) tahun 1948. Deklarasi ini mencantumkan penjaminan atas kebebasan manusia; terutama kebebasan beragama, berpendapat, kepemilikan, dan perilaku. Internasionalisasi ini dibutuhkan Amerika Serikat agar setiap tindakannya di dunia internasional menjadi legal atau sah meskipun sebenarnya sekadar untuk kepentingan nasional (*national interest*) Amerika Serikat semata.

Semenjak berakhirnya Perang Dingin bahkan hingga sekarang, belum ada yang memungkiri status Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia saat ini. Beberapa istilah melekat erat ketika membicarakan tentang keunggulan Amerika Serikat. Mulai dari adidaya, adikuasa, *super power*, *great power*, *central power*, hegemoni, serta beberapa istilah lainnya yang menunjukkan betapa hebatnya Amerika kini dalam percaturan dunia. Terlepas dari adanya kontroversi dari kelompok pesimis yang pada intinya menelaah persoalan ini dari masalah waktu-sampai kapan hegemoni Amerika ini akan berlangsung, namun realita menunjukkan bahwa eksistensi Amerika dengan berbagai predikat di atas, masih berlangsung hingga saat ini.

Kekuatan Amerika Serikat bisa dikatakan mengkhawatirkan. Dalam bidang militer, kekuatan militer Amerika Serikat hingga saat ini tidak

tertandingi, baik dari segi teknologi persenjataan maupun jumlah tentara Pada awal tahun 1990 Amerika Serikat menginvasi Irak untuk pertama kalinya, dan ini menjadi sebuah perhatian dunia internasional. Di tahun 2001, Amerika Serikat mendapat guncangan keamanan domestik dengan serangan bom pada gedung WTC, dan Pentagon. Serangan terhadap dua bangunan ini dijadikan alasan oleh Amerika Serikat untuk menyerang Irak dan Afghanistan, karena kedua negara mereka curigai sebagai basis pergerakan teroris internasional.

Tindakan-tindakan Amerika Serikat ini sungguh mengkhawatirkan terutama bagi negara-negara yang berada di bawahnya. Amerika Serikat selalu mencari cara agar dapat mencapai kepentingannya, terutama yang berhubungan dengan minyak bumi. Kerena Amerika sangat bergantung pada minyak bumi, sedangkan negara ini tidak mampu menyediakannya sendiri.

Amerika pada masa pemerintahan sebelum Obama merupakan salah satu negara yang kurang menjalin hubungan baik dengan negara-negara muslim seperti dengan Libya, Iran, dan juga Pakistan.¹ Amerika menganggap negara muslim umumnya menjadi tempat berlindung para teroris. Bush memiliki sikap koersif terhadap negara-negara tersebut dengan alasan untuk menjaga keamanan negaranya (*state security*).

Salah satu contoh dari hubungan buruk Amerika sebelum diperintah oleh Obama, dengan negara Islam adalah hubungan Amerika dengan Libya.

¹. *Libya Mulai Masuk dalam Era Pembaruan dan Keterbukaan*, (diakses tanggal 28 Februari 2013)
http://www.unisosdem.org/kliping_detail.php?aid=2703&coid=1&caid=24

Libya adalah negara Islam yang terletak di Afrika bagian utara, berbatasan dengan Laut Tengah, Mesir di sebelah timur, Sudan di tenggara, Chad dan Niger diselatan serta Aljazair dan Tunisia di sebelah barat. Semula Libya adalah sebuah kerajaan yang didirikan pada 24 Desember 1951.

Raja Idris I bertindak sebagai pemimpin pemerintahan. Italia merebut Libya dari kekaisaran Ottoman dan menjadikan Libya sebagai wilayah jajahannya. Libya mendapat kemerdekaan setelah Italia menyerah kepada sekutu dalam PD II. Tahun 1951, Amerika Serikat mendukung kemerdekaan Libya dan disusul dengan peningkatan hubungan sampai tingkat kedutaan.²

Hubungan Amerika Serikat dengan Libya berhenti ketika Kapten Muammar Khadafi memimpin revolusi Al Fatah untuk menyingkirkan Raja Idris pada tahun 1979. Pada masa kekuasaannya, Khadafi melancarkan revolusi budaya dengan maksud menyingkirkan semua ideologi dan pengaruh yang berasal dari barat seperti komunisme dan kapitalisme. Sejak saat ini hubungan antar keduanya semakin memburuk dan mencapai titik terendah. Pada tahun 1979, pesawat tempur Amerika menembak jatuh dua pesawat tempur Libya di atas teluk Sidra. Pesawat tempur tersebut ditembak karena lewat di atas teluk Sidra tanpa ijin sebelumnya. Insiden ini memperburuk hubungan keduanya dan dilanjutkan dengan penutupan kedutaan Amerika di Tripoli pada Februari 1980. Penutupan kedutaan Amerika Serikat di Libya menandakan bahwa hubungan antara Amerika Serikat dengan Libya secara

² . Islam, AS, dan Tesis Hutington (diakses tanggal 27 Mei 2013) dalam <http://www.voanews.com/indonesian/2008-04-11-voa11.cfm>

resmi terputus. Artinya, secara politik tidak ada hubungan antar kedua negara.
Pada Januari 1986,

Presiden Amerika Serikat yang saat itu sedang dijabat oleh Ronald Reagan memutuskan untuk menghentikan hubungan dagang dan ekonomi dengan Libya. Hubungan permusuhan Amerika Serikat-Libya sempat memuncak pada era Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan. Bahkan, atas perintah Reagan, Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke Tripoli dan Benghazi tahun 1986, menewaskan puluhan orang, termasuk seorang putri angkat Khadafy, sedangkan Khadafy sendiri selamat.³

Amerika Serikat kembali menjalin hubungan politik dengan Libya setelah terputus selama 24 tahun pada tanggal 29 Juni 2004. Presiden Amerika Serikat George W. Bush berjanji memulihkan hubungan kedua Negara secara penuh.⁴

Wakil Menteri Luar Negeri William Burns mengatakan dalam pernyataan resminya berkenaan pemulihan hubungan diplomatik tersebut, bahwa pihaknya telah meresmikan perwakilan Amerika Serikat di Tripoli dan membuka kembali hubungan yang terputus.

Krisis politik yang terjadi di Libya dilatar belakangi oleh ketidakpuasan rakyat Libya terhadap rezim pemerintah Khadafi yang cenderung otoriter dan menghalalkan segala cara demi melenggangkan kekuasaannya di

³ . Libya Masuk dalam era Pembaharuan dan Keterbukaan, *Op Cit.*

⁴ . AS Buka Hubungan Politik dengan Libya (diakses tanggal 27 Mei 2013) dari <http://arsip.gatra.com/2004-06-29/artikel.php?id=404091>

Libya, termasuk membunuh siapapun lawan politiknya yang berani menentang kekuasaannya.

Dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya selama 4 dekade lebih yaitu 42 tahun, Khadafi menggunakan tiga pilar penopang kekuasaannya yaitu uang, keluarga dan loyalitas.⁵ Tiga unsur inilah yang digunakan Khadafi selama berkuasa. Ketidakpuasan rakyat Libya terhadap pola kekuasaan Khadafi ini kemudian memunculkan gerakan-gerakan demonstran untuk menuntut Khadafi mundur.

Moammar Khadafi mulai goyang dalam panggung politik Libya ketika pada tahun 2010, dunia internasional diwarnai dengan munculnya gejolak demokrasi di Timur Tengah.⁶ Negara-negara dengan cap otoriter di Timur Tengah, mulai mendapatkan tekanan dari rakyatnya, yang menginginkan sistem pemerintahan yang demokratis, termasuk di antaranya yaitu Libya. Berbagai sanksi internasional terutama sanksi ekonomi dari Amerika Serikat yang dibebankan kepada Libya, mempengaruhi tidak hanya kondisi ekonomi tetapi juga politik Libya. Libya yang begitu tegas dan kuat sebagai aktor internasional, tetapi terdapat krisis pangan di dalam negaranya.

Pemberontakan dan gelombang menentang Khadafi terjadi merupakan refleksi dari inisiatif masyarakat Libya terhadap rezim yang di Motori Khadafi yang dinilai pemimpin otoriter. Sebagai Presiden yang telah menjabat dalam

⁵. *Anak susku dan uang* diakses (tanggal 28 februari) dari <http://internasional.kompas.com/read/2011/03/05/04520099>

⁶. James Joiner. 2011. *Libya After Qaddafi: Lessons From Iraq 2003*. *The Atlantic*. Diakses pada tanggal 28 Februari 2013 melalui <http://www.theatlantic.com/international/archive/2011/08/libya-after-qaddafi-lessons-fromiraq-2003/243946/>

kurun waktu yang tidak singkat yaitu sekitar 42 tahun, Khadafi dalam kebijakannya dinilai tidak merepresentasikan kepentingan rakyat

Krisis politik yang terjadi di Libya memiliki intensitas pergolakan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara Arab lainnya . Khadafi dalam menanggapi krisis politik yang cenderung terkait dengan aksi protes dan demonstrasi oleh masyarakat Libya lebih mengutamakan pendekatan yang represif. Tercatat bahwa pasukan Khadafi melakukan banyak pelanggaran dengan menembaki para demonstran secara membabi buta. Bahkan dengan menggunakan jet tempurnya. Jumlah korban demonstran anti Khadafi mencapai 1.000 orang.⁷ Hal ini kemudian diartikan sebagai pembantaian yang dilakukan oleh rezim di Libya terhadap warga sendiri dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pergolakan politik di Libya telah mengundang reaksi internasional akibat tindak kejahatan kemanusiaan oleh Khadafi. Moammar Khadafi dianggap telah melakukan pembantaian terhadap warga negaranya sendiri. Hal ini menyebabkan isu perlindungan terhadap warga sipil dan perdamaian menjadi asas bagi komunitas internasional untuk terlibat dalam krisis politik di Libya, tidak serta merta tanpa disertai kepentingan. Aktor-aktr tersebut membawa kepentingannya masing-masing dengan melihat situasi domestik di Libya dan tentunya hal tersebut berlaku juga bagi Amerika Serikat.

⁷. *Dukungan Dunia Untuk Libya*, diakses pada 26 Februari 2013 melalui <http://dunia.vivanews.com/news/read/206440-foto-dukungan-dunia-untuk-libya>

Salah satu kebijakan Amerika Serikat terhadap Libya adalah berperan dalam keluarnya resolusi DK PBB 1973⁸. Dengan adanya resolusi DK PBB untuk mengambil sikap terhadap Libya yang telah melanggar ketentuan HAM. Dalam pidatonya presiden Barack Obama menyebutkan untuk menghentikan pembunuhan yang dilakukan oleh Khadafi dan menjalankan resolusi 1973 DK PBB maka ia mengizinkan militer Amerika Serikat untuk mengambil tindakan terhadap Libya.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973 menghasilkan serangan udara dan laut atas wilayah-wilayah Libya oleh pasukan koalisi Amerika Serikat, Inggris, Prancis Kanada dan Italia. Resolusi tersebut mengesahkan zona larangan terbang di Libya dan memerintahkan “semua tindakan yang diperlukan” untuk melindungi warga sipil yang pada awalnya disambut pengumuman genjatan senjata oleh rezim Khadafi.

Tidakkah terjadi keanehan dalam kasus ini? Amerika dan sekutu mengeluarkan biaya yang fantastis untuk membantu para demonstran untuk menggulingkan Khadafi. Intervensi militer Amerika Serikat di Libya menelan biaya pembayaran pajak Amerika Serikat hampir 550 juta dolar. Biaya tersebut diduga sebesar 40 juta dolar perbulan.⁹

⁸. Sekjen PBB Desak Semua Pihak Hentikan Kekerasan di Libya
<http://international.okezone.com/read/2011/03/24/414/438249/>

⁹. Kebijakan Rahasia Obama Tentang Libya, (diakses tanggal 23 Juni 2013) dari
<http://sekalancws.com/baca/news/3/0/91059/internasional>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, oleh sebab itu ditemukan permasalahan yang akan dibahas, dijelaskan dan ditulis dalam skripsi ini, yaitu:

Mengapa Amerika Serikat terlibat dalam revolusi di Libya pada tahun 2011?

C. Kerangka Dasar Teori

Penulis menggunakan teori pembuatan keputusan (*decision making*) dari William D Coplin untuk memahami permasalahan di atas. Mengingat bahwa perumusan kebijakan politik suatu negara tidak lepas dari proses pembuatan keputusan.

Sbelum memasuki teori pembuatan keputusan William D Coplin pengertian *decision making approach* adalah suatu pendekatan melalui proses pengambilan keputusan dalam suatu masyarakat. Menurut Joseph Frankel, "*decision making constitutes ending in an act of will person who chose between two or more alternatives*".¹⁰ Dalam hal ini, seseorang atau sekelompok yang dihadapkan pada dua atau lebih alternatif pilihan, sedangkan penentuan pilihan itu sendiri harus disesuaikan dengan tujuan, sasaran, dan kemampuan yang tersedia.

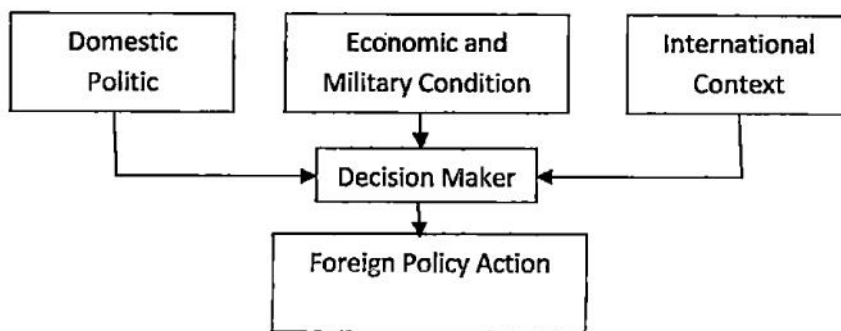
Secara singkat proses pembuatan keputusan dapat dipahami dengan

¹⁰ Joseph Frankel, *The Making of Foreign Policy, An Analysis of Decision Making*, Oxford University Press 1968, hal 4

melihat adanya unsur input dan output dalam setiap pembuatan keputusan dari suatu masyarakat atau negara. Unsur input datang dari masyarakat berupa masukan atau permintaan (demands) yang biasanya disalurkan melalui lembaga-lembaga politik ataupun kekuatan politik yang hidup dalam masyarakat. Proses penyaluran masukan ini sangat tergantung pada sistem politik yang sedang berlangsung dalam masalah tersebut. Dari kebijakan ini diharapkan dapat muncul feedback atau umpan balik yang berupa dukungan ataupun kritikan masyarakat terhadap kebijakan yang ditempuh pemerintah.

Menurut William D Coplin pengambilan keputusan suatu negara akan mempengaruhi tindakan luar negerinya, yang dalam konteks internasional yaitu suatu produk tindakan luar negeri suatu negara pada masa lampau, sekarang dan mendatang yang mungkin terjadi atau yang akan diantisipasi.¹¹ penentuan keputusan luar negeri dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: kondisi politik dalam negeri, situasi ekonomi dan militer, dan konteks internasional.

Proses pengambilan keputusan luar negeri dapat digambarkan sebagai berikut:



¹¹. William D Coplin. Pengantar politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, edisi kedua, Sinar Baru Bandung 1992, hal 30

Tiga faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan luar negeri yaitu:¹²

1. Situasi dalam negeri (Domestic Politic) termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Pembuatan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh keadaan dalam negerinya yang sedang terjadi atau tuntutan yang sedang berlangsung di dalam negeri. Pembuatan keputusan luar negeri dipengaruhi oleh perbedaan antara sistem politik autokrasi dan sistem politik demokrasi yang terletak dalam hal tujuan dan alat politik luar negerinya. dalam hal tujuan negara demokratis dianggap tidak tertarik pada aneksasi, dilain pihak negara autokaris dianggap tertarik untuk mendapatkan wilayah sebanyak mungkin dengan tujuan jahat. Dalah hal alat negara, negara demokratis dipandang cinta damai, negara autokaris dipandang suka menggunakan kekerasan untuk memajukan hukum dan organisasi internasional untuk memperluas kekuasaan mereka. Banyak analisis internasional beragumentasi bahwa konsekuensi-konsekuensi yang mempersatukan dari krisis eksternal sering menyebabkan para pengambil keputusan politik luar negeri, yan dihadapkan pada instabilitas di dalam negeri menjadi agresif di luar negeri.

Kondisi politik Amerika Serikat yang sedang mengalami transisi dari masa pemerintahan Bush ke Obama membuat ebijakan-kebijakan luar negeri Amerika Serikat banyak berubah. Hal ini dikarenakan perbedaan cara mengambi keutusan antara mantan Presiden Bush dan Presiden Obama,

¹². Ibid, hal 170

Presiden Bush lebih mengutamakan cara militer untuk mengatasi masalah luar negerinya, sedangkan Presiden Obama lebih mengutamakan kerjasama terlebih dahulu.

2. Kondisi militer dan ekonomi, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan dalam pertahanan keamanan. Faktor ekonomi dan militer sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri karena berpengaruh terhadap kekuatan menekan yang harus dimiliki dalam hubungan luar negerinya. Negara-negara yang memiliki kemampuan ekonomi dan militer yang kuat akan memperoleh keuntungan yang lebih dalam hubungannya dengan negara lain. Kemampuan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan melihat GNP (Gross National Product) nya, GNP adalah semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun.

3. Konteks internasional (situasi di negara dimana politik luar negeri ditujukan serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Hubungan politik dengan negara-negara lain dalam lingkungannya sangat berperan dalam keputusan politik luar negeri suatu negara. Aliansi-aliansi bisa berdampak besar terhadap anggota-anggotanya dan bukan anggotanya. Terutama bila aliansi itu menyangkut pasukan-pasukan yang berada di wilayah asing.

Libya adalah negara yang berada di wilayah Afrika, krisis politik yang terjadi di daerah Libya dianggap sangat membahayakan oleh Amerika Serikat, karena jika dibiarkan terus berlarut takutnya krisis politik akan

emluas dan membahayakan negara-negara yang berada di Afrika.

Dalam merumuskan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan politik luar negeri suatu negara/bangsa, kepentingan nasional memiliki arti strategis dan juga posisi yang penting. Kepentingan nasional sering dijadikan tolak-ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision maker*) masing-masing negara/bangsa sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan terkait suatu permasalahan. Termasuk menjadi patokan dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Setiap langkah kebijakan luar negeri (*foreign policy*) perlu dilandaskan pada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi, apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai kepentingan nasional tersebut.

Dalam kasus ini, pemerintah Inggris dan Perancis menuduh tentara Libya dalam memerangi tentara pemberontak tidak memperdulikan keselamatan rakyat sipil, pesawat-pesawat mereka sering membom sasaran-sasaran sipil, disengaja atau tidak disengaja. Karena itu kedua negara ini meminta agar pemerintah Libya memberlakukan kawasan bebas terbang. Kedua negara ini didukung oleh Amerika Serikat.

Tentu saja Libya menolak permintaan ini. Karena merasa diremehkan kedua negara ini ditambah Amerika Serikat mengusulkan agar permintaan ini dijadikan resmi sebagai permintaan dari PBB, caranya meminta 15 negara-negara Dewan Keamanan PBB untuk bersidang, apakah perlu kawasan bebas terbang ini menjadi resolusi PBB kepada Libya yang harus ditaati oleh negara itu. Resolusi PBB harus dipatuhi kalau tidak sanksinya akan berhadapan

dengan PBB, seluruh dunia, teorinya. Hasilnya, PBB mengeluarkan resolusi kawasan bebas terbang di Libya. Moammar Khadafi tetap menolak. Dewan Keamanan PBB pun bertindak. Tiga negara saat ini menyerang Libya, Amerika Serikat, Perancis dan Inggris. Perang masih dalam tahap meroket dan membom belum sampai tahapan mengirim pasukan darat. Tindakan militer PBB ini tidak membuat Khadafi terlihat takut. Bahkan dia menyatakan kalau aksi militer ini adalah aksi illegal karena pihaknya hanya ingin memadamkan pemberontakan. PBB sudah melanggar prinsipnya sendiri untuk tidak ikut campur dalam masalah domestik suatu negara. Khadafi juga mengingatkan negara-negara pelanggar kedaulatan Libya itu bahwa perang akan berlangsung lama. Pernyataan ini harus ditanggapi dengan serius karena keluar dari seorang pemimpin yang pernah menjadi symbol militansi dunia ketiga. Perang kecil bisa menjadi perang besar, perang sesungguhnya.

Di saat Amerika Serikat masih dipusingkan dengan urusan di Irak dan Afganistan mengapa negara ini mau melibatkan diri dalam perang kecil yang bisa berubah menjadi perang besar ini? Apa untungnya?

Sebagai Negara yang menganut liberalisme, isu penegakan HAM, penegakan demokrasi, kebebasan individu, juga keterbukaan pasar adalah isu yang fundamental dalam kajian liberalisme. Khadafi dianggap telah melakukan kejahatan yang melanggar isu-isu penegakan kaum liberalisme seperti pembantaian terhadap rakyat sipil, menutup pasar dalam negeri sehingga kesejahteraan rakyatnya tidak terjamin dan lain sebagainya. Hal ini

lah yang menyebabkan Amerika Serikat turut serta dalam membantu para pemberontak di Libya.

Faktor ekonomi adalah hal yang paling banyak dikaitkan oleh para ilmu sosial terkait politik luar negeri Amerika Serikat ke Libya. Hal ini wajar saja terkait sebagian besar pendapatan Negara Libya disumbangkan dari ekspor minyak. Walaupun Libya bukan termasuk dalam 15 negara penghasil minyak atau tepatnya Libya berada pada peringkat ke-18 yang 'hanya' menghasilkan 1.789.000 bbl/hari ini jauh dibandingkan dengan mitra dagang Amerika Serikat sendiri yaitu Arab Saudi yang menghasilkan 10.520.000 bbl/hari. Para pemikir politik beranggapan adanya kepentingan ekonomi dalam politik luar negeri Amerika Serikat di Libya hal itu disebabkan karena adanya krisis ekonomi yang dialami Amerika pada saat itu.

Faktor lain yang mempengaruhi politik luar negeri Amerika Serikat adalah faktor kapabilitas Amerika Serikat sebagai Negara besar dan super power yang sangat berpengaruh di dunia internasional termasuk PBB kekuatan militer Amerika Serikat adalah kekuatan nomor satu di dunia dan belum ada tandingannya pasca kejatuhan Uni Soviet. Jadi, untuk menjaga statusnya sebagai penjaga perdamaian dunia Amerika Serikat turun tangan dalam krisis politik yang sedang terjadi di Libya.

Keputusan presiden Obama untuk menyerang Libya ini diumumkan dari Brasil tempat dia melakukan kunjungan kerja.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan keterlibatan Amerika Serikat dalam penggulingan presiden Muammar Khadafi.
2. Untuk menambah wawasan politik di Negara-negara timur tengah

E. Hipotesa

Dari teori diatas dapat ditarik sebuah hipotesa sebagai jawaban sementara dari penelitian ini mengenai faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait krisis di Libya yaitu faktor dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer serta konteks internasional.

F. Metode Penulisan dan Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, dalam hal ini mengenai keterlibatan Amerika dalam penggulingan presiden Muammar Khadafi.

Data-data yang digunakan dalam penelitian karya tulis ini diperoleh melalui studi pustaka. Studi ini diperoleh untuk mendapat landasan teori beserta data-data skunder dengan maksud agar dapat digunakan dalam menganalisis rumusan masalah. Data-data diperoleh melalui buku-buku

literature, jurnal-jurnal di internet, dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

G. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan tidak meluas dan penyelsaiannya lebih kongkrit, maka penulis menggunakan batasan terhadap penelitian ini. Batasan waktu yang digunakan penulis adalah sejak Muammar Khadafi menjadi presiden di Libya hingga terjadinya Revolusi yang menggulingkan kekuasaannya.

H. Sistematika Penulisan

Utuk mendapatkan hasil karya tulis yang teratur dan sistematis, maka secara keseluruhan penulis membagi karya tulis ini kedalam 4 (empat) bab dengan sistematika sbagai berikut:

BAB I. Pedahuluan

Pendahuluan merupakan bab yang memuat alas an pemilihan judul, latar belakang masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, methodology penulisan dan pengumpulan data, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Dunia Internasional dan Libya Selama ini

Pada bab ini membahas mengenai politik luar negeri Amerika terhadap dunia internasional dan Libya sebelum tahun 2011 atau sebelum terjadinya refolusi di Libya.

BAB III. Keterlibatan Amerika Serikat di Libya

Pada bab ini akan di bahas gerakan-gerakan perlawanan terhadap Khadafi sebelum refolusi serta sikap Amerik selama Refolusi di Libya.

BAB IV. Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Amerika Serikat di Libya

Pada bab ini akan dibahas kesimpulan alasan Amerika ikut serta dalam refolusi di Libya.

BAB V. KESIMPULAN